

Judul : Densus Tipikor Sandera RAPBN 2018
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Densus Tipikor Sandera RAPBN 2018

Pemerintah akan menghubungkan setiap kementerian yang bermitra dengan Komisi I, III, dan VI untuk menyelesaikan pembahasan anggaran.

ERANDHI HUTOMO S
erandhi@mediaindonesia.com

RENCANA persetujuan RAPBN 2018 di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR ditunda hingga hari ini. Penundaan tersebut disebabkan Komisi I, III, dan VI belum menyerahkan laporan hasil pembahasan komisi kepada banggar.

"Saya harap Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI tidak keberatan. Kami semua fraksi sepakat kita skors sampai besok sampai setelah paripurna (pengesahan Perppu Ormas) sehingga komisi dan lembaga yang tersisa masih bisa mengejar (pembahasan)," ujar Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin.

Menurut Aziz, setelah pembahasan dilanjutkan hari ini, selanjutnya laporan banggar untuk pengesahan RAPBN 2018 akan disampaikan di rapat paripurna DPR yang akan digelar Rabu (25/10).

"Kita tidak boleh lebih dari

pukul 23.00 besok (hari ini) karena Rabu (25/10) kita sudah masuk rapat paripurna tentang laporan banggar sekaligus pidato penutupan masa sidang," ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak masalah dengan penundaan itu.

Ia akan menghubungkan setiap kementerian/lembaga yang bermitra dengan Komisi I, Komisi III, dan Komisi VI untuk segera menyelesaikan pembahasan anggaran.

"Pada dasarnya kami dukung proses politik yang sekomplek mungkin dari tiga komisi untuk menyelesaikan pembahasan anggarannya," kata Sri.

Pembahasan alot

Akan tetapi, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menyebut salah satu alasan ditundanya persetujuan RAPBN 2018 oleh banggar itu ialah masih alotnya pembahasan terkait dengan anggaran untuk densus tipikor senilai Rp2,6 triliun di Komisi III.

"Ya di Komisi III masih ada pembahasan juga di antaranya ada soal densus tipikor karena memang nomenklatur. Strukturnya itu harus jelas karena kalau tidak, anggaran tidak bisa keluar," jelasnya.

Said mengaku hingga saat ini banggar tidak pernah membahas anggaran densus tipikor karena tidak pernah ada pengajuan dari pemerintah.

Terlebih, keputusan pemerintah terkait dengan densus

tipikor baru dibahas di Istana hari ini.

Meski demikian, Said menegaskan banggar akan menolak jika anggaran densus tersebut merupakan anggaran tambahan di luar anggaran Polri yang disetujui sebesar Rp77 triliun dan menyarankan agar dimasukkan ke RAPBN-P 2018.

Namun, bila anggaran densus tipikor masuk ke anggaran Polri yang telah disepakati banggar sebesar Rp77 triliun, banggar tidak memperlmasalahkannya.

Said menyebutkan, jika hari ini pemerintah menyetujui pembentukan densus tipikor, hal itu menjadi urusan Komisi III untuk menyesuaikan dengan anggaran Polri yang telah disetujui.

"Yang terpenting kesepakatan apakah ada alokasi anggaran untuk densus tipikor atau tidak harus diserahkan Komisi III sebelum rapat banggar dimulai."

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengakui hingga saat ini belum ada keputusan terkait dengan anggaran untuk densus tipikor.

Hal itu disebabkan Komisi III memerlukan cetak biru yang jelas dari Polri terkait dengan keberadaan densus tipikor.

Meskipun tidak bisa terakomodasi di APBN 2018, anggaran densus tipikor masih bisa dialokasikan di RAPBN-P 2018.

Ia menampik belum disepakatinya anggaran disebabkan masih menunggu hasil rapat terbatas pemerintah yang bakal digelar hari ini. (P-2)